BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan merupakan proses demokrasi yang memiliki tingkat kompleksitas tinggi karena melibatkan berbagai tahapan yang harus dilaksanakan secara berkesinambungan, tepat waktu, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Keberhasilan penyelenggaraan setiap tahapan tidak hanya ditentukan oleh kualitas regulasi dan sistem kelembagaan, tetapi juga oleh sumber daya manusia yang menjalankan seluruh proses tersebut. Dalam konteks ini, pegawai di lingkungan Komisi Pemilihan Umum (KPU) memegang peranan strategis sebagai pelaksana administratif sekaligus pendukung operasional penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan. Berbeda dengan sebagian besar organisasi publik yang memiliki ritme kerja relatif stabil sepanjang tahun, pekerjaan di lingkungan KPU mengalami perubahan intensitas yang sangat signifikan ketika memasuki tahapan Pemilu dan Pemilihan. Pegawai Komisi Pemilihan Umum (KPU) dituntut bekerja secara profesional, cepat, dan adaptif untuk memastikan setiap tahapan berlangsung tepat waktu, akurat, dan sesuai ketentuan. Konsekuensinya, ketika memasuki tahapan Pemilu dan Pemilihan, ritme kerja organisasi berubah secara signifikan dengan meningkatnya volume pekerjaan, intensitas koordinasi, mobilitas, serta tekanan penyelesaian tugas dalam waktu yang terbatas (Silawane et al., 2024). Karakteristik tersebut menjadikan tahapan Pemilu dan Pemilihan sebagai periode kerja dengan tekanan yang jauh lebih tinggi dibandingkan masa non tahapan.

Peningkatan intensitas kerja tersebut semakin nyata pada penyelenggaraan Pemilu Tahun 2024 dan Pemilihan Serentak Tahun 2024. Kedua agenda nasional tersebut berlangsung hampir tanpa jeda sehingga pegawai KPU harus menangani beberapa tahapan yang saling beririsan dalam waktu yang bersamaan. Kondisi tersebut diperkuat melalui Surat Edaran Sekretaris Jenderal KPU Nomor 5 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja Pegawai di Lingkungan Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota pada Masa Tahapan Pemilu dan Pemilihan Serentak Tahun 2024. Kebijakan tersebut mengatur penyesuaian sistem kerja, termasuk penerapan jadwal piket, kesiapsiagaan pegawai, serta kewajiban menjaga komunikasi secara berkelanjutan untuk mendukung kelancaran seluruh tahapan Pemilu. Konsekuensinya, jam kerja pegawai tidak lagi terbatas pada jam kerja formal, tetapi menyesuaikan kebutuhan organisasi sesuai perkembangan tahapan Pemilu dan Pemilihan. Selama tahapan Pemilu dan Pemilihan berlangsung, peningkatan intensitas pekerjaan tidak hanya berdampak pada bertambahnya jam kerja, tetapi juga mengubah pola kehidupan sehari-hari pegawai. Berbagai pekerjaan harus diselesaikan dalam batas waktu yang sangat ketat, koordinasi dilakukan hingga malam hari, perjalanan dinas meningkat, dan berbagai persoalan teknis di lapangan harus segera ditangani tanpa mengenal batas hari kerja.

No.	Periode	Tahapan Pemilu Tahun 2024	Tahapan Pemilihan Tahun 2024	Gambaran Ritme Kerja KPU
1	14 Juni 2022	Dimulainya tahapan Pemilu 2024	–	Awal rangkaian kerja kepemiluan jangka panjang
2	Juni–Desember 2022	Perencanaan program dan anggaran, penyusunan PKPU, pemutakhiran data pemilih, serta pendaftaran dan verifikasi peserta Pemilu	–	Berbagai tahapan persiapan dan administrasi berlangsung secara bersamaan
3	Januari–Desember 2023	Pemutakhiran data pemilih, penetapan daerah pemilihan, pencalonan anggota legislatif, DPD, serta Presiden dan Wakil Presiden	–	Intensitas kerja meningkat karena tahapan teknis dan administrasi semakin kompleks
4	28 November 2023–10 Februari 2024	Masa kampanye Pemilu	–	KPU melakukan koordinasi, fasilitasi, pengawasan, dan persiapan pemungutan suara
5	14 Februari 2024	Pemungutan dan penghitungan suara Pemilu	–	Memasuki puncak intensitas kerja Pemilu
6	15 Februari–20 Maret 2024	Rekapitulasi hasil penghitungan suara	**Tahapan Pemilihan telah dimulai sejak 26 Januari 2024**	**Penyelesaian pekerjaan Pemilu berlangsung berdekatan dengan dimulainya pekerjaan Pemilihan**
7	April–Juni 2024	Penyelesaian agenda pasca-Pemilu	Persiapan Pemilihan, pembentukan badan adhoc, dan persiapan pemutakhiran data pemilih	Terjadi peralihan cepat dari pekerjaan Pemilu menuju Pemilihan
8	Juni–September 2024	Agenda lanjutan pasca-Pemilu	Pemutakhiran data pemilih, pencalonan, dan penetapan pasangan calon	Fokus kerja beralih pada tahapan teknis dan administrasi Pemilihan
9	September–November 2024	Penyelesaian agenda kelembagaan pasca-Pemilu	Kampanye dan persiapan pemungutan suara	KPU kembali memasuki periode dengan intensitas kerja tinggi
10	27 November 2024	–	Pemungutan dan penghitungan suara Pemilihan	Puncak intensitas kerja Pemilihan
11	November 2024–selesainya tahapan	–	Rekapitulasi hasil penghitungan suara dan penyelesaian tahapan Pemilihan	Beban kerja berlanjut hingga tahapan pascapemungutan suara selesai

Tabel 1. Tahapan Pemilu dan Pemilihan Serentak Tahun 2024

Berdasarkan Tabel Tahapan Pemilu dan Pemilihan Serentak Tahun 2024 dapat dilihat bahwa pekerjaan kepemiluan tidak berlangsung dalam waktu yang singkat, melainkan terbentuk dalam rangkaian tahapan yang panjang dan berkelanjutan. Tahapan Pemilu Tahun 2024 telah dimulai sejak 14 Juni 2022, sementara tahapan Pemilihan Tahun 2024 dimulai pada 26 Januari 2024 ketika sejumlah tahapan Pemilu, termasuk rekapitulasi hasil penghitungan suara, masih berlangsung. Kondisi tersebut menunjukkan adanya keberlanjutan ritme kerja dari penyelenggaraan Pemilu menuju Pemilihan. Setelah menyelesaikan tahapan utama Pemilu, KPU kembali menjalankan berbagai tahapan Pemilihan hingga memasuki pemungutan suara pada 27 November 2024 dan proses rekapitulasi hasil setelahnya. Rangkaian tahapan tersebut menggambarkan bahwa tahun 2024 merupakan periode kerja dengan tuntutan yang terus berlangsung dan berubah sesuai dengan perkembangan setiap tahapan kepemiluan. Keberlanjutan tahapan tersebut berimplikasi terhadap tingginya tuntutan kerja pegawai KPU. Pegawai tidak hanya menghadapi peningkatan volume pekerjaan, tetapi juga tuntutan penyelesaian tugas dalam batas waktu tertentu, kebutuhan koordinasi yang tinggi, perubahan ritme kerja, serta tuntutan kesiapsiagaan selama tahapan berlangsung. Dengan demikian, kepadatan pekerjaan pada masa tahapan tidak hanya ditunjukkan oleh banyaknya kegiatan yang harus dilaksanakan, tetapi juga oleh keberlanjutan tuntutan pekerjaan dalam periode yang panjang.

Padatnya beban kerja pada masa tahapan tergambar dari data Kementerian Kesehatan RI yang mencatat lebih dari 8.300 petugas penyelenggara Pemilu 2024 harus menjalani perawatan medis akibat kelelahan, dan puluhan di antaranya

meninggal dunia akibat beban kerja yang berlebihan selama masa pemungutan dan penghitungan suara (Kementerian Kesehatan RI, 2024, dalam Tempo, 2024). Kondisi serupa juga dilaporkan pada jenjang kesekretariatan KPU, sebagaimana temuan Silawane et al. (2024) pada Sekretariat KPU Kota Ambon yang mengungkapkan bahwa pegawai kerap harus tetap berada di kantor selama beberapa hari berturut-turut tanpa pulang ketika beberapa tahapan pemilu berlangsung bersamaan, sehingga menegaskan bahwa tingginya beban kerja pada masa tahapan bukan sekadar persepsi subjektif pegawai, melainkan kondisi yang telah terdokumentasi secara empiris.Di tingkat provinsi, KPU Provinsi Sumatera Barat turut mencatat 12 petugas Pemilu meninggal dunia dan 50 orang lainnya mengalami sakit selama pelaksanaan Pemilu 2024 (Afrianto, 2024). Data tersebut memperlihatkan bahwa tingginya intensitas dan tekanan kerja pada masa tahapan Pemilu dan Pemilihan bukan sekadar persepsi subjektif pegawai, melainkan kondisi objektif yang berdampak nyata terhadap kondisi fisik dan psikologis sumber daya manusia penyelenggara Pemilu, termasuk di lingkungan Sekretariat KPU Provinsi Sumatera Barat.

Di balik tingginya tuntutan tersebut, terdapat kelompok pegawai yang memiliki pengalaman kerja yang relatif berbeda, yaitu pegawai perempuan. Dalam konteks tersebut, pengalaman pegawai perempuan menjadi menarik untuk dikaji karena mereka tidak hanya menghadapi peningkatan tuntutan pekerjaan, tetapi juga tetap menjalankan berbagai tanggung jawab keluarga yang tidak berhenti ketika tahapan Pemilu dan Pemilihan berlangsung. Penelitian ini tidak dibangun atas asumsi bahwa perempuan bekerja lebih berat dibandingkan laki-

laki ataupun bahwa laki-laki tidak memiliki tanggung jawab terhadap keluarga. Penelitian ini berangkat dari kenyataan bahwa pengalaman perempuan dalam menjalankan pekerjaan dipengaruhi oleh konstruksi sosial mengenai pembagian peran berdasarkan *gender*. Meskipun saat ini semakin banyak laki-laki yang terlibat dalam pengasuhan dan pekerjaan domestik, berbagai penelitian menunjukkan bahwa perempuan masih lebih sering diposisikan sebagai penanggung jawab utama terhadap pengelolaan rumah tangga dan pengasuhan anak. Oleh karena itu, ketika organisasi memasuki periode dengan intensitas kerja yang tinggi, perempuan menghadapi proses negosiasi yang lebih kompleks antara tuntutan profesional dan kebutuhan keluarga. Situasi tersebut menjadikan pengalaman perempuan dalam menjaga *Work Life Balance* memiliki karakteristik yang khas dan penting untuk dipahami secara lebih mendalam. Penelitian ini berangkat dari kenyataan bahwa pengalaman perempuan dalam dunia kerja dibentuk oleh interaksi antara tuntutan organisasi dan konstruksi *gender* yang berkembang di masyarakat. Dalam berbagai konteks sosial di Indonesia, perempuan yang bekerja masih sering memikul tanggung jawab utama dalam pengasuhan anak, pengelolaan rumah tangga, dan berbagai pekerjaan domestik lainnya. Akibatnya, ketika organisasi memasuki periode dengan intensitas kerja yang tinggi, perempuan tidak hanya menghadapi peningkatan tuntutan profesional, tetapi juga tetap menjalankan tanggung jawab keluarga yang tidak serta merta berkurang. Kondisi tersebut menyebabkan munculnya beban ganda (*double burden*) yang masih menjadi salah satu isu utama dalam kajian *gender.* Beban ganda menggambarkan situasi ketika perempuan harus memenuhi tuntutan

pekerjaan profesional tanpa diikuti oleh berkurangnya tanggung jawab domestik (Hochschild, 1990; Walby, 1990). Dalam praktiknya, perempuan tidak hanya dituntut untuk menyelesaikan pekerjaan sesuai target organisasi, tetapi juga tetap memastikan berbagai kebutuhan keluarga terpenuhi. Pada keluarga yang memiliki anak usia balita, kebutuhan tersebut menjadi lebih besar karena pengasuhan memerlukan keterlibatan fisik, emosional, dan psikologis yang intensif. Oleh karena itu, pengalaman perempuan dalam menjaga *Work Life Balance* tidak hanya dipengaruhi oleh pembagian waktu, tetapi juga dipengaruhi oleh besarnya tanggung jawab yang harus dikelola secara bersamaan.

Selain beban ganda, perempuan yang bekerja juga sering menghadapi mental *load*, yaitu beban kognitif dan emosional yang muncul karena harus terus mengingat, merencanakan, mengoordinasikan, dan memastikan berbagai kebutuhan keluarga berjalan dengan baik. Mental *load* berbeda dengan pekerjaan domestik yang bersifat fisik karena berkaitan dengan proses berpikir dan pengambilan keputusan yang berlangsung secara terus-menerus. Seorang perempuan yang sedang bekerja, misalnya, tetap memikirkan kebutuhan anak, jadwal sekolah, kesehatan anggota keluarga, hingga berbagai urusan rumah tangga meskipun secara fisik sedang berada di kantor. Beban yang bersifat tidak terlihat tersebut sering kali tidak diakui sebagai bagian dari pekerjaan, tetapi memiliki pengaruh yang besar terhadap kesejahteraan psikologis maupun kemampuan individu dalam mempertahankan keseimbangan antara pekerjaan dan kehidupan pribadi (Daminger, 2019). Hal tersebut menjadikan pengalaman perempuan dalam

menjaga *Work Life Balance* memiliki karakteristik yang khas dan penting untuk dipahami secara lebih mendalam.

Fenomena tersebut tampak nyata di lingkungan KPU Provinsi Sumatera Barat. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara pendahuluan yang dilakukan peneliti terhadap beberapa pegawai perempuan, hampir seluruh informan menggambarkan tahapan Pemilu dan Pemilihan sebagai periode kerja dengan tekanan paling tinggi. Mereka menyatakan bahwa pekerjaan sering datang secara bersamaan, harus segera diselesaikan, dan tidak jarang muncul di luar jam kerja normal. Dalam kondisi tersebut, kesempatan untuk berkumpul bersama keluarga menjadi sangat terbatas sehingga waktu bersama pasangan maupun anak hanya dapat dimanfaatkan ketika terdapat jeda pekerjaan. Dampak yang paling banyak dirasakan adalah kelelahan fisik, meningkatnya tekanan psikologis, serta berkurangnya waktu untuk memenuhi kebutuhan pribadi dan keluarga. Temuan awal ini menunjukkan bahwa tantangan *Work Life Balance* merupakan pengalaman nyata yang dialami pegawai perempuan, bukan sekadar konsep teoritis.

Menariknya, para informan tidak memandang pekerjaan sebagai beban yang harus dihindari. Mereka memahami bahwa tingginya intensitas kerja merupakan konsekuensi dari tanggung jawab sebagai penyelenggara Pemilu dan Pemilihan. Tantangan yang mereka rasakan justru muncul ketika tuntutan organisasi berlangsung bersamaan dengan tanggung jawab keluarga yang tidak dapat ditunda. Dalam situasi tersebut, mereka berusaha membangun berbagai strategi adaptasi, seperti menyusun prioritas pekerjaan, memperkuat kolaborasi

dalam tim, memanfaatkan teknologi untuk mempercepat penyelesaian tugas, serta menggunakan waktu luang yang tersedia untuk menjaga kedekatan dengan keluarga. Temuan ini menunjukkan bahwa *Work Life Balance* bukan dipahami sebagai kondisi ideal tanpa tekanan, melainkan sebagai proses negosiasi yang terus berlangsung antara tuntutan pekerjaan dan kehidupan keluarga. Hal ini mengindikasikan bahwa keberhasilan menjaga keseimbangan kehidupan kerja tidak hanya bergantung pada kemampuan individu, tetapi juga dipengaruhi oleh dukungan organisasi, sistem kerja, budaya organisasi, serta lingkungan sosial tempat pegawai menjalankan berbagai perannya.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa organisasi memiliki peran yang sangat penting dalam menciptakan lingkungan kerja yang mampu mendukung kesejahteraan pegawai tanpa mengurangi kualitas penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan. Dalam perspektif manajemen sumber daya manusia modern, kesejahteraan pegawai tidak lagi dipandang sebagai isu personal tetapi merupakan bagian dari strategi organisasi dalam menjaga keberlanjutan kinerja. Pegawai yang memperoleh dukungan organisasi yang memadai cenderung memiliki kemampuan adaptasi yang lebih baik, tingkat stres yang lebih rendah, serta komitmen organisasi yang lebih tinggi (Eisenberger et al., 1986). Sebaliknya, apabila organisasi kurang memperhatikan kebutuhan pegawai, terutama pada periode dengan intensitas kerja yang tinggi, maka berbagai dampak negatif seperti kelelahan, penurunan kesejahteraan psikologis, hingga menurunnya kualitas pelayanan berpotensi muncul dalam jangka panjang.

Kondisi tersebut diperkuat oleh profil pegawai perempuan di KPU Provinsi Sumatera Barat. Dari 28 (dua puluh delapan) pegawai perempuan yang bekerja di lingkungan KPU Provinsi Sumatera Barat, sekitar 76% telah menikah dan memiliki anak, dua orang berstatus single parent, sedangkan 14 orang masih memiliki anak usia balita. Karakteristik ini menunjukkan bahwa sebagian besar informan berada pada fase kehidupan yang membutuhkan keterlibatan intensif dalam pengasuhan dan pengelolaan keluarga. Oleh karena itu, meningkatnya beban kerja selama tahapan Pemilu dan Pemilihan tidak hanya berdampak pada aktivitas pekerjaan, tetapi juga mempengaruhi bagaimana mereka menjalankan berbagai peran dalam kehidupan keluarga. Data tersebut memperkuat bahwa fokus penelitian pada pegawai perempuan bukan didasarkan pada jumlah pegawai, melainkan pada karakteristik pengalaman yang mereka alami.

Fenomena tersebut menunjukkan bahwa tantangan *Work Life Balance* di lingkungan KPU tidak cukup dijelaskan sebagai persoalan kemampuan individu dalam mengatur waktu. Pengalaman pegawai perempuan dibentuk oleh interaksi antara karakteristik kerja elektoral, tuntutan organisasi, kondisi keluarga, serta konstruksi sosial mengenai pembagian peran berdasarkan g*ender*. Dengan demikian, memahami pengalaman mereka memerlukan pendekatan yang mampu menggali makna pengalaman hidup (lived experience), sehingga penelitian tidak hanya menjelaskan apa yang terjadi, tetapi juga mengapa pengalaman tersebut muncul dan bagaimana perempuan memaknainya dalam konteks pekerjaan penyelenggara Pemilu.

Work Life Balance perempuan bekerja telah menjadi perhatian dalam berbagai disiplin ilmu, khususnya manajemen sumber daya manusia, psikologi kerja, administrasi publik, dan studi *gender*. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa meningkatnya partisipasi perempuan dalam dunia kerja diikuti oleh meningkatnya tantangan dalam menyeimbangkan tuntutan pekerjaan dengan kehidupan keluarga. Namun demikian, karakteristik tantangan tersebut sangat dipengaruhi oleh jenis organisasi, budaya kerja, serta konteks pekerjaan yang dijalani, sehingga temuan pada satu organisasi tidak dapat secara langsung digeneralisasikan pada organisasi lainnya.

Penelitian-penelitian terdahulu umumnya menunjukkan bahwa perempuan bekerja menghadapi tekanan yang bersumber dari tuntutan pekerjaan dan tanggung jawab domestik yang berlangsung secara bersamaan. Niendhya Milleniva et al. (2023) menemukan bahwa pekerja perempuan mengalami kesulitan menjaga keseimbangan kehidupan kerja akibat meningkatnya tuntutan pekerjaan dan tanggung jawab keluarga. Temuan serupa dikemukakan oleh Banjarnahor & Mardianto (2024) yang menunjukkan bahwa perempuan mengembangkan berbagai strategi, seperti manajemen waktu, pengelolaan stres, dan dukungan keluarga, untuk mempertahankan keseimbangan antara pekerjaan dan kehidupan pribadi. Penelitian Huda & Firdaus (2020) serta Pratiwi et al. (2022) juga menegaskan pentingnya dukungan organisasi dalam membantu perempuan menghadapi konflik antara pekerjaan dan keluarga. Meskipun demikian, penelitian-penelitian tersebut dilakukan pada organisasi dengan karakteristik pekerjaan yang relatif stabil sehingga belum menggambarkan

pengalaman perempuan dalam organisasi yang memiliki ritme kerja sangat dinamis dan berbasis tahapan seperti KPU.

Dalam konteks penyelenggara Pemilu, penelitian mengenai *Work Life Balance* masih didominasi oleh pendekatan kuantitatif yang menempatkan *Work Life Balance* sebagai variabel yang memengaruhi produktivitas, loyalitas, atau kinerja pegawai. Penelitian Iqbal mengenai KPU Kota Pontianak, Bate'e dkk. pada KPU Kota Gunungsitoli, serta Rahayu dkk. menunjukkan bahwa keseimbangan kehidupan kerja berpengaruh terhadap kinerja, produktivitas, maupun loyalitas pegawai. Hasil tersebut memperlihatkan bahwa *Work Life Balance* merupakan faktor penting dalam mendukung efektivitas organisasi. Akan tetapi, fokus penelitian masih terbatas pada hubungan antarvariabel sehingga belum menjelaskan bagaimana pegawai perempuan mengalami, memaknai, dan merespons berbagai tuntutan yang muncul selama tahapan Pemilu dan Pemilihan berlangsung.

Dari perspektif *gender*, beberapa penelitian telah membahas posisi perempuan dalam lembaga penyelenggara Pemilu, Budhiati et al. (2024) mengkaji persoalan kuota *gender* dalam kelembagaan KPU, sedangkan Okthariza et al. (2025) menyoroti representasi perempuan dalam lembaga penyelenggara Pemilu di Indonesia. Kedua penelitian tersebut memberikan kontribusi penting dalam memahami isu representasi dan hambatan struktural yang dihadapi perempuan dalam organisasi penyelenggara Pemilu dan Pemilihan. Namun, fokusnya berada pada aspek regulasi, representasi politik, dan kelembagaan, sehingga belum menjelaskan pengalaman pegawai perempuan yang menjalankan pekerjaan

administratif dan teknis selama tahapan Pemilu. Dengan demikian, dimensi pengalaman sehari-hari (*everyday experience*) perempuan di lingkungan KPU masih relatif belum banyak dikaji.

Berdasarkan telaah terhadap penelitian terdahulu, terdapat tiga kesenjangan penelitian (*research gap*) yang menjadi dasar penting dilakukannya penelitian ini. Pertama, sebagian besar penelitian mengenai *Work Life Balance* masih dilakukan pada organisasi dengan ritme kerja yang relatif stabil, sedangkan organisasi penyelenggara Pemilu memiliki karakteristik kerja elektoral yang ditandai dengan lonjakan beban kerja, tenggat waktu yang ketat, dan intensitas koordinasi yang tinggi. Kedua, penelitian sebelumnya umumnya menggunakan pendekatan kuantitatif sehingga lebih berorientasi pada pengujian hubungan antarvariabel, sementara pengalaman subjektif pegawai perempuan dalam menghadapi dinamika pekerjaan selama tahapan Pemilu belum banyak dieksplorasi. Ketiga, penelitian mengenai perempuan di lingkungan KPU lebih banyak membahas keterwakilan politik atau kinerja organisasi, sedangkan kajian yang mengintegrasikan perspektif *gender* dengan pengalaman *Work Life Balance* pegawai perempuan masih sangat terbatas. Kesenjangan tersebut menunjukkan bahwa masih terdapat ruang akademik yang perlu diisi untuk memahami bagaimana perempuan memaknai pengalaman bekerja dalam organisasi penyelenggara Pemilu yang memiliki karakteristik kerja berbeda dengan organisasi publik lainnya.

Berawal dari kesenjangan tersebut, penelitian ini menawarkan perspektif yang berbeda. Penelitian tidak berfokus pada pengukuran tingkat *Work Life*

Balance maupun pengaruhnya terhadap kinerja, tetapi berupaya memahami pengalaman hidup (*lived experience*) pegawai perempuan selama menjalankan tahapan Pemilu dan Pemilihan. Dengan menggunakan pendekatan fenomenologi dan Perspektif Feminisme Sosialis, penelitian ini menempatkan pengalaman perempuan sebagai pusat analisis untuk memahami bagaimana karakteristik kerja elektoral, pembagian peran domestik, serta konstruksi *gender* saling berinteraksi membentuk pengalaman *Work Life Balance*. Pendekatan tersebut diharapkan mampu memberikan kontribusi baru terhadap pengembangan kajian manajemen sumber daya manusia, studi *gender*, serta tata kelola organisasi penyelenggara Pemilu.

Uraian mengenai karakteristik pekerjaan di lingkungan KPU, kondisi empiris pegawai perempuan, serta hasil telaah penelitian terdahulu menunjukkan bahwa tantangan *Work Life Balance* tidak dapat dipahami sebagai persoalan individual semata. Pengalaman pegawai perempuan merupakan hasil interaksi antara karakteristik organisasi penyelenggara Pemilu, dinamika pekerjaan selama tahapan berlangsung, kondisi keluarga, serta konstruksi sosial mengenai pembagian peran berdasarkan *gender*. Interaksi berbagai faktor tersebut menghasilkan pengalaman yang bersifat unik, dinamis, dan kontekstual sehingga tidak dapat dijelaskan hanya melalui pendekatan yang mengukur tingkat keseimbangan antara pekerjaan dan kehidupan pribadi.

Dalam konteks KPU Provinsi Sumatera Barat, kompleksitas tersebut semakin nyata karena organisasi tidak hanya bertanggung jawab melaksanakan tahapan Pemilu pada tingkat provinsi, tetapi juga menjalankan fungsi koordinasi,

pembinaan, supervisi, monitoring, dan evaluasi terhadap seluruh KPU Kabupaten/Kota. Tanggung jawab tersebut menyebabkan intensitas pekerjaan meningkat secara signifikan pada setiap tahapan Pemilu dan Pemilihan. Kondisi ini menciptakan lingkungan kerja yang berbeda dibandingkan sebagian besar organisasi publik sehingga pengalaman pegawai perempuan dalam menjaga *Work Life Balance* juga memiliki karakteristik yang berbeda. Oleh karena itu, penelitian yang dilakukan pada organisasi lain belum tentu mampu menjelaskan pengalaman perempuan yang bekerja dalam lingkungan penyelenggara Pemilu.

Berdasarkan hasil telaah literatur dan kondisi empiris yang ditemukan, penelitian ini mengidentifikasi empat bentuk kesenjangan (*research gap*). Pertama, penelitian mengenai *Work Life Balance* pada lembaga penyelenggara Pemilu masih sangat terbatas sehingga belum memberikan gambaran mengenai pengalaman pegawai perempuan dalam konteks kerja elektoral. Kedua, sebagian besar penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif yang berorientasi pada pengukuran hubungan antarvariabel, sedangkan pengalaman subjektif perempuan selama tahapan Pemilu belum banyak dieksplorasi. Ketiga, penelitian mengenai perempuan di lingkungan KPU lebih banyak membahas representasi politik, keterwakilan perempuan, atau kinerja organisasi, sementara pengalaman perempuan sebagai pegawai sekretariat masih relatif belum menjadi perhatian. Keempat, penggunaan Perspektif Feminisme Sosialis dalam kajian *Work Life Balance* di lingkungan penyelenggara Pemilu masih sangat terbatas, padahal perspektif tersebut mampu menjelaskan hubungan antara struktur organisasi,

pembagian kerja domestik, dan konstruksi *gender* yang membentuk pengalaman perempuan.

Atas dasar kesenjangan tersebut, penelitian ini menawarkan beberapa kebaruan (*novelty*). Dari aspek konteks, penelitian dilakukan pada KPU Provinsi Sumatera Barat yang memiliki karakteristik kerja elektoral dan fungsi koordinatif yang berbeda dengan organisasi publik lainnya. Dari aspek subjek, penelitian memusatkan perhatian pada pegawai perempuan sekretariat KPU yang selama ini relatif jarang menjadi fokus penelitian. Dari aspek metodologi, penelitian menggunakan pendekatan fenomenologi untuk menggali pengalaman hidup (*lived experience*) pegawai perempuan dalam menghadapi tantangan menjaga keseimbangan antara pekerjaan dan kehidupan pribadi selama tahapan Pemilu dan Pemilihan. Pendekatan fenomenologi dipilih karena memberikan ruang bagi informan untuk menceritakan pengalaman mereka secara utuh berdasarkan makna yang mereka rasakan, bukan berdasarkan kategori yang telah ditentukan sebelumnya. Dengan demikian, penelitian ini tidak bertujuan mengukur tingkat *Work Life Balance*, melainkan memahami bagaimana perempuan memaknai berbagai pengalaman tersebut dalam konteks pekerjaan di KPU Provinsi Sumatera Barat.

Sementara itu, dari aspek teoretis, penelitian menggunakan Perspektif Feminisme Sosialis sebagai landasan analisis karena dinilai mampu menjelaskan bahwa pengalaman perempuan tidak hanya dipengaruhi oleh karakteristik individu, tetapi juga oleh struktur organisasi, pembagian kerja domestik, serta konstruksi *gender* yang berkembang dalam masyarakat. Perspektif ini

memungkinkan penelitian melihat tantangan *Work Life Balance* sebagai hasil interaksi antara sistem kerja organisasi dan realitas sosial yang masih membentuk pembagian peran perempuan di dalam keluarga. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman yang lebih utuh mengenai pengalaman pegawai perempuan, sekaligus memperkaya kajian mengenai *Work Life Balance* dalam organisasi publik yang memiliki karakteristik kerja elektoral.

Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi pada dua aspek. Secara akademik, penelitian memperkaya pengembangan kajian *Work Life Balance* melalui perspektif *gender* dengan menghadirkan konteks organisasi penyelenggara Pemilu yang selama ini masih jarang diteliti. Temuan penelitian diharapkan dapat memperluas pemahaman mengenai bagaimana karakteristik kerja elektoral memengaruhi pengalaman perempuan serta melengkapi kajian mengenai *Work Life Balance* yang selama ini lebih banyak berorientasi pada hubungan antarvariabel. Secara praktis, hasil penelitian diharapkan menjadi masukan bagi KPU dalam mengembangkan kebijakan pengelolaan sumber daya manusia anatara lain seperti *job design*, beban kerja, dukungan organisasi dan kebijakan SDM yang lebih responsif terhadap kebutuhan pegawai perempuan, khususnya pada masa tahapan Pemilu dan Pemilihan. Kebijakan tersebut dapat berupa penguatan dukungan organisasi, pengelolaan beban kerja, peningkatan kesejahteraan pegawai, maupun pengembangan lingkungan kerja yang lebih adaptif terhadap dinamika pekerjaan elektoral.

Berdasarkan seluruh uraian tersebut, dapat dipahami bahwa tantangan *Work Life Balance* pegawai perempuan di KPU Provinsi Sumatera Barat

merupakan fenomena yang penting untuk diteliti karena tidak hanya berkaitan dengan kesejahteraan individu, tetapi juga berhubungan dengan keberlanjutan kinerja organisasi dalam menyelenggarakan Pemilu yang demokratis, profesional, dan berintegritas. Memahami pengalaman pegawai perempuan menjadi penting untuk menjelaskan bagaimana mereka memaknai berbagai tuntutan yang muncul selama tahapan Pemilu dan Pemilihan, bagaimana strategi yang mereka lakukan untuk mempertahankan keseimbangan kehidupan kerja, serta bagaimana organisasi dapat membangun sistem kerja yang lebih responsif terhadap kebutuhan pegawai.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dipaparkan, terlihat bahwa fenomena *Work Life Balance* pada pegawai perempuan di lingkungan KPU Provinsi Sumatera Barat merupakan persoalan yang kompleks dan dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik yang bersifat organisasional maupun individual. Tingginya tuntutan kerja selama tahapan Pemilu dan Pemilihan serentak, yang berlangsung secara intensif dan beririsan, semakin memperberat upaya perempuan dalam menyeimbangkan peran antara pekerjaan dan kehidupan pribadi. Kondisi ini menunjukkan adanya dinamika yang perlu dikaji secara lebih mendalam, khususnya dalam perspektif *gender*, guna memahami bagaimana perempuan menghadapi dan memaknai tantangan tersebut dalam konteks kerja yang spesifik.

Oleh karena itu, untuk memperoleh pemahaman yang lebih terarah dan sistematis, maka penelitian ini dirumuskan dalam beberapa pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana pengalaman pegawai perempuan di KPU Provinsi Sumatera Barat dalam menghadapi tantangan *Work Life Balance* pada masa tahapan Pemilu dan Pemilihan serentak tahun 2024?
2. Bagaimana pegawai perempuan memaknai peran ganda antara tuntutan pekerjaan dan tanggung jawab domestik dalam konteks kerja di lingkungan KPU Provinsi Sumatera Barat ?
3. Bagaimana pegawai perempuan menginterpretasikan dampak ketidakseimbangan *Work Life Balance* terhadap pengalaman kerja mereka?

1.3 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk menggali dan memahami pengalaman pegawai perempuan di KPU Provinsi Sumatera Barat dalam menghadapi tantangan *Work Life Balance* pada masa tahapan Pemilu dan Pemilihan serentak tahun 2024.
2. Untuk mengkaji bagaimana pegawai perempuan memaknai peran ganda antara tuntutan pekerjaan dan tanggung jawab domestik dalam konteks kerja di lingkungan KPU Provinsi Sumatera Barat.
3. Untuk memahami dan menginterpretasikan bagaimana pegawai perempuan memaknai dampak ketidakseimbangan *Work Life Balance* terhadap pengalaman kerja mereka di lingkungan KPU Provinsi Sumatera Barat.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis:

1.4.1 Manfaat Teoritis

1. Memberikan kontribusi terhadap pengembangan literatur tentang *Work Life Balance* dalam konteks lembaga penyelenggara pemilu dengan perspektif *gender*.
2. Memperkaya kajian manajemen Sumber Daya Manusia, administrasi publik dan studi *gender*, khususnya terkait isu keseimbangan kerja-kehidupan pegawai perempuan di sektor publik.
3. Memberikan kontribusi terhadap pengembangan teori *Work Life Balance* dengan perspektif *gender* di organisasi dengan karakteristik beban kerja yang periodik.
4. Menyediakan kerangka analisis *gender* yang dapat digunakan untuk mengkaji *Work Life Balance* di berbagai konteks organisasional.
5. Memberikan pemahaman mendalam tentang bagaimana konstruksi *gender* mempengaruhi pengalaman kerja perempuan di birokrasi pemerintahan Indonesia.

1.4.2 Manfaat Praktis

1. Bagi KPU Provinsi Sumatera Barat:
   a. Memberikan masukan untuk perbaikan kebijakan terkait *Work Life Balance* pegawai.
   b. Menjadi dasar penyusunan program kesejahteraan pegawai yang responsif *gender.*
   c. Meningkatkan pemahaman manajemen tentang tantangan spesifik pegawai perempuan.

d. Menjadi referensi dalam merumuskan kebijakan SDM yang responsif *gender*

e. Memberikan gambaran *best practices* pengelolaan *Work Life Balance* di instansi penyelenggara pemilu

2. Bagi Pegawai Perempuan:

a. Memberikan pemahaman tentang hak-hak terkait *Work Life Balance*

b. Menyediakan informasi tentang strategi efektif mengelola keseimbangan kerja-kehidupan

3. Bagi Pembuat Kebijakan:

Menyediakan *evidence based recommendation* untuk pengembangan kebijakan publik yang responsif *gender* di sektor pemerintahan.

4. Bagi Bagi Masyarakat:

Meningkatkan kesadaran tentang pentingnya *Work Life Balance* dan kesetaraan *gender* di tempat kerja

YAYASAN PENDIDIKAN DHARMA ANDALAS
UNTUK KECERDASANBANGSA
UNIDHA
UNIVERSITAS DHARMA ANDALAS